

TAJUK RENCANA

Netralitas Pemerintah dalam Konflik Parpol

PARTAI Demokrat (PD) sedang dilanda konflik serius menyusul sejumlah kader yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara yang kemudian memilih Moeldoko sebagai ketua umum PD. Sedang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menurut versi KLB, dinyatakan demisioner. Moeldoko yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pun menyatakan kesediaannya menjadi Ketua PD.

Peristiwa tersebut tentu saja memantik kontroversi, bukan saja di internal PD tapi di kalangan masyarakat, pengamat dan ahli hukum. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat masih tetap solid meski ada ketua tandingan yang dipilih lewat KLB di Deli Serdang Sumatera Utara (KR 8/3). AHY juga menegaskan KLB yang digelar di Deli Serdang tidaklah sah dan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan AD ART Partai Demokrat. KLB tersebut disebutnya sebagai KLB dagelan.

Namun, itulah fenomena politik yang tergelar di depan mata publik. Tentu ini PR berat yang harus dihadapi PD, apalagi bila dikaitkan dengan konsolidasi menyambut pemilihan presiden 2025 mendatang. Konflik internal seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi pada PKB di masa kepemimpinan SBY sebagai presiden.

Gejala-gejala pengambilalihan kepemimpinan PD dari tangan AHY sebenarnya sudah nampak jauh hari sebelum digelar KLB. Bahkan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengakui didatangi kader yang memintanya untuk mengambil alih kepemimpinan AHY melalui KLB, namun Gatot menolak. Hingga akhirnya, Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI bersedia menerima tawaran mengambil alih kepemimpinan AHY sebagai Ketua PD melalui KLB. Lantas, bagaimana keabsahan KLB dengan ke-

tua baru Moeldoko?

Inilah poin penting yang menentukan nasib PD ke depan. Benar bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan mencampuri konflik internal PD. Ditinjau dari aspek politik memang demikian adanya. Namun dari aspek hukum tentu tidak demikian, karena sah tidaknya KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua PD, tak punya legitimasi bila tidak disahkan pemerintah. Jadi, bola sekarang ada di tangan pemerintah untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan KLB dengan kepemimpinan Moeldoko.

Pendapat menarik disampaikan mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie yang menawarkan dua opsi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yakni dengan menyarankan kepada pemerintah untuk menolak KLB bila didaftarkan di Kemenkumham, karena AHY adalah pemegang sah SK dari Kemenkumham. Sedang yang kedua, menyarankan pemerintah untuk memberhentikan Moeldoko dari jabatan KSP dan mengangkat pejabat baru sebagai pengganti. Sebab Moeldoko dianggap terlibat dalam KLB di Deli Serdang, Jumat (5/3) dan bersedia menjadi ketua menggeser AHY.

Dalam kondisi seperti sekarang, di saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memerangi Covid-19, rasanya memang tidak elok bila pemerintah masuk dalam pusaran konflik internal parpol, apalagi menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Kita menginginkan pemerintah bersikap netral dan memastikan demokrasi tetap berjalan. Sebagai instrumen negara, pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah juga perlu memastikan, segala pelanggaran hukum sekecil apapun tak dapat ditoleransi. Netralitas pemerintah ini akan terlihat saat pendaftaran legalitas KLB di Kemenkumham, diterima atau ditolak. □

Refleksi Budaya Satu Tahun Covid-19

B Sumardiyanto

terpental menjadi tumbal. Akibatnya kesenjangan sosial semakin melebar dan berpotensi menyebarkan benih-benih intoleransi. Pembangunan kehilangan wajah sosialnya karena cenderung eksklusif hanya melayani mereka yang bisa membayar. Lingkunganpun menjadi korban. Kerusakan lingkungan yang begitu



nya, adalah salah satu konsep pembangunan berkelanjutan tanpa tumbal. Warisan nenek moyang ini seolah-olah kehilangan relevansinya di tengah gemuruh pembangunan yang hanya mengejar keuntungan. Konsep ini menyadarkan sekaligus mengajak kita agar pembangunan yang selama ini berwujud bengis terhadap mereka yang jadi tumbal (baca: orang miskin dan lingkungan) harus berubah menjadi lebih ramah. Pembangunan juga harus semakin merangkul semua golongan guna merajut kembali kesatuan masyarakat yang selama ini tercabik-cabik. Tradisi yang berlandaskan kearifan lokal harus dikembangkan secara kreatif agar tetap relevan dalam mengarungi perkembangan zaman dan mampu menghadirkan kembali *hayuning bawana* yang kita impikan.

Mari terus berubah dan jangan pernah menyerah pada Covid-19. Pandemi ini harus disikapi secara positif agar menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Korona bukan virus terakhir, masih ada virus-virus lain yang menghadang di depan. □

*) **Dr B Sumardiyanto**, Kepala Laboratorium Perencanaan & Perancangan Lingkungan & Kawasan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Anggota Dewan Kebudayaan DIY 2020

masif akhirnya menyisakan keraguan apakah kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih relevan dikedepankan?

Normal Baru

Betapapun pahitnya, kita harus berlapang dada mengakui bahwa pembangunan di zaman normal lama telah mengarah pada kehancuran alam dan kehidupan di dalamnya. Karena itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus berubah. Dari mana dan bagaimana harus memulainya?

Secara kultural kita memiliki modal berupa berbagai warisan kearifan lokal yang tak akan lekang oleh waktu. *Hamemayu Hayuning Bawana*, misal-

Hal ini menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam praktik pembangunan di masa normal lama dan harus dibenahi di masa normal yang baru.

Normal Lama

Tuhan telah memberikan udara, air, tanah, dan segala macam tumbuh-tumbuhan serta binatang di darat dan di air kepada manusia secara cuma-cuma. Tapi manusia, tidak seperti Tuhan Yang Maha Pemurah, lebih suka membuat aturan yang bersifat mencari keuntungan. Semua harus membayar, tidak ada yang gratis. Siapa yang dapat bermain dalam permainan seperti itu? Tentu hanya mereka yang berduit cukup. Bagi mereka yang tidak mampu pasti akan

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-1100
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Formalitas dan Substansi

SEBELUM wabah virus Korona masuk ke Indonesia, setiap seminggu sekali di hari Senin pagi sekolah senantiasa melaksanakan upacara bendera. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari pelaksanaan upacara bendera, seperti menanamkan cinta tanah air, melatih kedisiplinan, mengenang jasa para pahlawan, dan lain sebagainya. Selesai upacara bendera dilanjutkan dengan para siswa berjabat tangan (mencium) tangan para guru sebelum masuk ke ruang kelas. Semua itu merupakan upaya penanaman karakter dan budi pekerti yang baik semenjak dini, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD).

Namun setelah virus Korona melanda, pembelajaran tatap muka di sekolah kemudian digantikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). Dengan demikian, kebiasaan di lingkungan sekolah yang sudah membudaya itu akhirnya tidak dilaksanakan lagi. Pertanyaannya kemudian bagaimana menanamkan karakter atau budi pekerti kepada para siswa di masa pandemi Covid-19 melalui PJJ atau BDR seperti sekarang ini?

Sebelum menjawab hal itu, di antara kita mungkin ada yang menilai dan berkata bahwa kegiatan di sekolah seperti itu hanya merupakan bentuk formalitas belaka, dan belum tentu menyentuh substansi dari penanaman karakter dan budi pekerti siswa yang hakiki.

Dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita harus mengatakan, bahwa penilaian seperti itu belum tentu benar dan belum tentu salah sepenuhnya. Artinya, bisa benar manakala kebiasaan itu dilaksanakan tanpa diiringi kesadaran dan ketulusan hati. Namun di sisi lain kita bisa mengatakan, bahwa kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang maka akan ter-

tanam dalam jiwa setiap warga sekolah. Nilai-nilai kebaikan itu lambat laun akan mengendap dan akhirnya melahirkan sikap atau tindakan positif dalam keseharian. Hal inilah yang kemudian disebut karakter. Tentu perlu ditegaskan bahwa hal itu memerlukan waktu yang tidak singkat.

Menanggapi pertanyaan di atas, hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak antara sekolah dan keluarga siswa di rumah. Kegiatan upacara bendera dan jabat tangan antara siswa dan guru sudah tidak terselenggara lagi. Maka dari itu, perlu diupayakan kebiasaan baik yang dilaksanakan di rumah dalam upaya penanaman karakter siswa.

Dari pihak guru di sekolah, pemberian tugas di samping ada yang bersifat kognitif seyogyanya melibatkan pula tugas yang bersifat afektif dan psikomotorik. Misalnya dengan pemberian tugas siswa harus membiasakan bersalaman (mencium) tangan kedua orang tua, membiasakan bangun pagi, merapikan tempat tidur sendiri, membantu menyapu lantai, mencuci sendiri peralatan makan yang sudah dipakai, dan lain-lain. Dan pihak keluarga di rumah ikut serta membantu siswa melaksanakan kebiasaan positif tersebut.

Melalui penugasan pembiasaan di rumah seperti itu, penanaman karakter atau budi pekerti kepada para siswa diharapkan dapat terus berkelanjutan. Dengan demikian, kita berharap bahwa proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) tidak mengikis karakter siswa, namun justru dapat melahirkan insan masa depan berbudi pekerti luhur yang bukan sekadar formalitas tapi menjangkau substansi hakiki. □

*) **DS Apandi**, SD 1 Padokan, Kasihan, Bantul.

Agenda Lama Bupati Baru

Farid B. Siswanto

Sejumlah isu khusus yang memerlukan perkara terkait disabilitas itu menyangkut, misalnya, pendidikan inklusif; sensitivitas terhadap difabel; ketenagakerjaan, baik menyangkut pengembangan dan rekrutmentnya; penyediaan sarana-prasarana umum bagi disabilitas dan jaminan kesehatan khusus. Manakala isu-isu demikian itu tidak ditindak-lanjuti, maka perhatian kepada disabilitas sesungguhnya baru sebatas angan-angan.

Pendulum

Peraturan bupati merupakan wahan manifestasi visi-misi bupati, yang secara esensial adalah menyejahterakan rakyat, apapun rumusan visi-misi itu. Gayutan moralnya adalah Pancasila, Konstitusi dan turunannya — yang sampai di bawah dengan mengacu ke Rencana Pembangunan Nasional, hingga menindaklanjuti perda dan meneruskan hal baik dari pendahulunya. Di sini perbup menjadi instrumen otonomi daerah yang penting (Jumadi 2008). Pada kondisi bupati tidak membikin perbup, jelas *political will* bupati tidak terwujud.

Para bupati baru (di manapun) mungkin merasa menemukan semacam ironi: Bagaimana dia yang bukan memasuki periode jabatan kedua harus mewujudkan *political will* dan visi-misi sendiri dalam keadaan sudah ada perda produk DPRD dan bupati sebelumnya? Sebenarnya, hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebih. Sebab, bupati baru dapat membuat semacam sofistikasi dengan menyusun perbup yang sesuai dengan visi atau cita-citanya sendiri. Batasannya hanyalah agar

perbup itu dibuat *nyanthol* pada perda lama yang sudah ada; perda dijadikan pendulum yang mengikat konten perbup secara relatif leluasa. Terkait waktu, perencanaan perbup diberi waktu maksimal setahun sebagaimana Permendagri 80/2015. Diterbitkan lebih cepat tentu lebih baik. Jika tidak, maka niscaya akan mengundang masalah untuk mewujudkan 'DIY Ramah Difabel 2024'.

Memang, seandainya Bupati tidak membuat perbup-pun, dinas-dinas dan perangkat di bawahnya niscaya tetap akan melaksanakan perda sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun hal itu akan sebatas jangkauan minimal yang dimungkinkan kewenangannya. Sehingga visi-misi Bupati yang dulu dikampanyekan dengan riuh-rendah itu tidak bakal terwujud manakala perangkat pemerintahan dilepas secara *laissez-faire*. Walhasil, menyusun perbup adalah pilihan terbaik Bupati untuk menuangkan visinya menuju DIY sebagai provinsi inklusi pada 2024. □

*) **Drs Farid B Siswanto MIP**, Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas DIY

Pojok KR

Vaksin Sinovac mampu tangkal virus B117.
-- **Sayangnya masih banyak warga belum divaksinasi.**

AHY tegaskan jajarannya solid.
-- **Butuh legitimasi pemerintah.**

Vaksinasi massal capai 89, 79 persen.
-- **Perlu cek lapangan.**

Beraks

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%